

EVALUASI FASILITAS TEMPAT PEMBERHENTIAN ANGKUTAN UMUM DI DAERAH TERBAGUS (TERBANGGI BESAR, BANDAR JAYA, GUNUNG SUGIH)

Sherly	SUBARTO, ATD, MM	SUGITA, MM
Taruna politeknik transportasi darat Indonesia-STTD,jurusan D III Manajemen Transportasi Jalan ,jl.Raya setu 89,Bekasi 17520,Indonesia Telp:085212186432,Email: sherlyputrii123@gmail.com	Pengajar politeknik transportasi darat indonesia-STTD,jurusan D III manajemen transportasi jalan,jl.Raya setu 89,Bekasi 17520 Indonesia	Pengajar politeknik transportasi darat indonesia-STTD,jurusan D III manajemen transportasi jalan,jl.Raya setu 89,Bekasi 17520 Indonesia

Abstract

As a public facility, the existence of supporting facilities such as bus stops must be able to provide comfort for users according to standard procurement rules so that the existence of public transportation can continue to run. From the problems that exist in the field, there are still bus stops that have not functioned optimally as a place for passengers to get up and down, stop facilities that are not in accordance with the technical instructions for the bus stop. To overcome the problems encountered in the field, optimization of the existing bus stops in Terbagus district was carried out by analyzing the existing conditions with existing minimum service standards and choosing the best alternative. has been established. Based on the results of the analysis of the need for shelters in Terbagus Regency, it is necessary to add 8 bus stops to the passenger pocket along the roads traversed by rural transport routes. One of the efforts made is the provision of public transportation stop facilities, both bus stops, placement of transportation stop facilities. generally adjusted to the results of the location determination analysis.

Keywords: bus stop, existing, facilities, service standard.

Abstrak

Sebagai fasilitas umum, keberadaan fasilitas penunjang seperti halte harus dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna sesuai dengan standar aturan pengadaan sehingga keberadaannya angkutan umum dapat terus berjalan. Dari permasalahan yang ada di lapangan, masih terdapat halte yang belum berfungsi secara maksimal sebagai tempat naik turunnya penumpang, fasilitas halte yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis halte. Untuk mengatasi permasalahan yang ditemui di lapangan, dilakukan optimalisasi halte eksisting di daerah Terbagus dengan menganalisis kondisi eksisting dengan standar pelayanan minimal eksisting dan memilih alternatif terbaik. telah ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan shelter di daerah Terbagus maka perlu dilakukan penambahan 8 halte padakantong penumpang di sepanjang jalan yang dilalui jalur angkutan pedesaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyediaan fasilitas halte angkutan umum, baik halte, penempatan fasilitas halte angkutan. umumnya disesuaikan dengan hasil analisis penentuan lokasi.

Kata kunci: halte, eksisting, fasilitas, standar pelayanan.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Berdasarkan peraturan bupati kabupaten lampung tengah terdapat 12 trayek angkutan perdesaan. Namun berdasarkan hasil eksisting dari 12 trayek tersebut hanya 5 trayek yang masih aktif sedangkan untuk 7 trayek lainnya sudah tidak aktif lagi dikarenakan faktor pandemi saat sekarang ini. Berdasarkan hasil survei inventarisasi angkutan umum dari 5 trayek tersebut didapatkan data mengenai jumlah tempat pemberhentian angkutan umum yang berjumlah 10 halte yang tersebar pada trayek angkutan perdesaan tersebut, Adapun kondisinya belum optimal berdasarkan fungsi, fasilitas serta letak halte tersebut. Masyarakat lebih memilih menunggu angkutan umum tidak pada halte dikarenakan letak halte yang terlalu jauh serta fasilitas halte yang kurang lengkap, halte yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai tempat berjualan sehingga mengakibatkan pengguna tidak nyaman berada di halte. Penyebab lainnya yaitu Lokasi halte yang kurang tepat penempatannya sehingga masyarakat jarang menunggu angkutan umum tidak pada halte.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Halte yang terletak di daerah TERBAGUS Kabupaten Lampung Tengah belum berfungsi secara optimal sebagai tempat untuk naik turun penumpang;
2. Lokasi penempatan halte yang kurang tepat penempatannya seperti diletakkan sehingga masyarakat jarang menunggu angkutan umum tidak pada halte.
3. Fasilitas -fasilitas halte yang belum sesuai dengan pedoman teknis halte seperti masih banyak halte yang tidak memiliki papan nama /identitas halte, pagar, tempat sampah, dan lampu penerangan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi eksisting dari keberadaan halte di daerah Terbagus sudah sesuai dengan pedoman teknis sesuai fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang?
2. Bagaimana cara menentukan lokasi halte yang ideal berdasarkan pedoman teknis (Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No.271/HK.105/DRJD96) agar dapat berperan sebagai tempat naik turun penumpang?
3. Berapa ukuran dimensi fasilitas halte agar sesuai dengan standar pedoman teknis dan kebutuhan penumpang?

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penulisan Kertas Kuliah Wajib ini yaitu untuk mengevaluasi fasilitas halte angkutan umum di kabupaten Wonosobo, serta memberikan alternatif usulan terkait permasalahan mengenai halte angkutan umum tersebut.

Tujuan dari penulisan kertas kerja wajib ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fasilitas halte untuk mengetahui kondisi Eksisting halte
2. Menganalisis penentuan lokasi halte yang ideal berdasarkan pedoman teknis
3. Memberikan saran desain fasilitas halte dengan memperhatikan dimensi ruang agar sesuai dengan pedoman teknis.

BATASAN MASALAH

1. Lokasi penelitian diwilayah kabupaten Lampung Tengah yang dilewati trayek angkutan perdesaan kabupaten Lampung Tengah;
2. Mengidentifikasi halte tersebut terletak pada tempat sesuai dengan standar letak teknik sehingga dapat digunakan sebagai tempat naik – turun penumpang angkutan umum
3. Menentukan titik –titik tempat pemberhentian fasilitas halte berdasarkan kantong–kantong penumpang dan tata guna lahan;

TINJAUAN PUSTAKA

Halte adalah tempat pemberhentian angkutan umum di sepanjang rute angkutan umum, yang berfungsi sebagai tempat naik dan turunnya penumpang atau menunggu angkutan umum. Selain itu keberadaan halte dapat meminimalkan gangguan dan kelancaran lalu lintas. Keberadaan halte sangat penting dalam pengaturan sistem operasi dan layanan angkutan umum,yaitu memberi kepastian bagi pengemudi angkutan umum dalam mencari tempat calon penumpang dan bagi penumpang merupakan tempat menunggu serta mencari jurusan angkutan yang sesuai dengan tujuannya. Untuk itu halte perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, serta lokasi yangsesuai dengan tata ruang lingkungannya.

1.Fasilitas utama

- a. Identitas halte berupa nama dan/atau nomor;
- b. Rambu petunjuk;
- c. Papan informasi trayek;
- d. Lampu penerangan;
- e. Tempat duduk.

2.Fasilitas tambahan

- A. Telepon umum
- b. Tempat sampah
- c. Pagar
- d. Papan iklan / pengumuman

METODOLOGI PENELITIAN

ALUR PIKIR PENELITIAN

Alur pikir penelitian dalam penulisan kertas kerja wajib ini merupakan tahapan - tahapan kegiatan dalam melakukan analisis dari tahapan awal penelitian samapai tahap akhir penelitian. Nantinya dari hasil penelitian akan menghasilkan suatu usulan - usulan dan suatu rekomendasi .berikut tahapan dari alur pikir penelitian .

1. Identifikasi masalah
2. Pengumpulan data
3. Pengelolaan data

Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis fasilitas halte sesuai standar teknis

Melakukan analisa terhadap kebutuhan halte dengan indikator:

- a. Standarisasi penentuan kebutuhan halte;
 - b. Penentuan kebutuhan halte di segmen yang dilalui trayek angkutan umum;
 - c. Penentuan jumlah kebutuhan halte berdasarkan jarak;
 - d. Fasilitas Pejalan Kaki Menyusuri;
 - e. Penentuan luas dimensi ruang kebutuhan halte.
2. Identifikasi kebutuhan halte

Dari data-data input yang ada, selanjutnya digunakan untuk menganalisa kebutuhan halte dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Lokasi tempat pemberhentian penumpang;
- b. Jarak antar tempat pemberhentian penumpang.

3. Penilaian kebutuhan halte

Dengan penilaian kebutuhan tersebut dapat ditetapkan skenario sebagai perbandingan sebagai berikut:

- a. Penilaian jumlah permintaan penumpang akan kebutuhan tempat pemberhentian penumpang (halte);
- b. Penilaian lokasi dan membandingkannya dengan standar teknis.

4. Rekomendasi

Dari tahapan analisis maka dapat diusulkan pembangunan halte dilihat dari aspek tata guna lahan, kantong penumpang, jarak antar halte.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Standarisasi Penentuan Kebutuhan Halte

1. Analisa Data Dinamis

Dari data dinamis terdapat jumlah penumpang yang naik dan turun pada setiap segmen dimana hasil data tersebut diperoleh dari survei dinamis angkutan perdesaan kupaten lampung tengah. Survei dinamis angkutan perdesaan ini dilakukan pada saat peak agar mendapatkan jumlah penumpang yang ideal baik yang turun maupun yang naik. Berikut ini di **Tabel V.14** merupakan analisa dinamis angkutan perdesaan .

NO	TRAYEK	SEGMENT	PNP NAIK	PNP TURUN	JUMLAH PNP
1	A1, B, A2	TERMINAL BANDAR JAYA - SIMPANG POLSEK TB	4	3	7
2	A1, B, A2	SIMPANG POLSEK TB - HALTE TK PEMBINA YK JAYA	5	5	10

3	A1, B, A2	HALTE TK PEMBINA YK JAYA - SIMPANG KOPEL	4	6	10
4	A1	SIMPANG KOPEL - SD NEGERI 1 PONCOWATI	1	1	2
5	A1	SD NEGERI 1 PONCOWATI - TRANSAT PONCOWATI	1	1	2
6	B, A2	SIMPANG KOPEL - SIMPANG KECAMATAN TB	3	4	7
7	B	SIMPANG KECAMATAN TB - PASAR CANDIREJO	1	1	2
8	A2	SIMPANG KECAMATAN TB - PASAR BANDAR AGUNG	3	1	4
9	G, C1	TERMINAL BANDAR JAYA - PERTOKOAN NADIA BUSANA	2	2	4
10	G, C1	PERTOKOAN NADIA BUSANA - SIMPANG TUGU KOPIAH EMAS	5	4	9
11	G	SIMPANG TUGU KOPIAH EMAS - SMPN 2 GUNUNG SUGIH	2	2	4
12	G	SMPN 2 GUNUNG SUGIH - SMPN 2 ANAK TUHA	1	1	2
13	G	SMPN 2 ANAK TUHA - SMAN 1 ANAK TUHA	1	1	2
14	C1	SIMPANG TUGU KOPIAH EMAS - HALTE SMPN 1 GUNUNG SUGIH	1	1	2

2. Penentuan Interval Kelas

Setelah melakukan survei dinamis guna mendapatkan jumlah penumpang naik turun. Diketahui terdapat jumlah data naik turun penumpang sebanyak 14 data. Selanjutnya akan dilakukan penentuan interval kelas, dalam melakukan penentuan interval kelas dilakukan tahapan sebagaimana berikut.

$$k = 1 + 3.3 \log n$$

k = jumlah interval kelas

n = jumlah data

Perhitungan:

$$k = 1 + 3,3 \log 14$$

$$k = 1 + 3,3 \times 1,15$$

$$k = 4,8$$

3. Penentuan Lebar Interval Kelas

Dilihat dari data naik turun penumpang diketahui pada segmen 2 dan 3 memiliki jumlah penumpang terbanyak dengan 10 penumpang. dan jumlah sedikit pada segmen 4 dengan jumlah 2 penumpang. Dari data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui lebar interval kelas. Berikut perhitungan lebar interval kelas :

$$C = R / K$$

Keterangan:

C = Lebar interval kelas

R = Kisaran data (Range)

Data Terbesar – Data Terkecil = Jumlah Interval Kelas

Contoh Perhitungan $R = 10 - 2 = 8$

$$C = R / K$$

$$C = 8 / 4,8$$

$$C = 2,3$$

$$C = 2 \text{ (dibulatkan)}$$

4. Analisis Distribusi Frekuensi

Setelah melakukan perhitungan lebar interval kelas, dari nilai yang didapatkan dari perhitungan tersebut dapat dilakukan analisis distribusi frekuensi terhadap data jumlah naik dan turunnya penumpang pada setiap segmen. Dari data tersebut diubah menjadi data distribusi frekuensi.

NO	INTERVAL KELAS	FREKUENSI	FREKUENSI KOMULATIF	PERSENTASE	PERSENTASE KOMULATIF
1	2 -3	6	6	43%	43%
2	4 -5	3	9	21%	64%
3	6 -7	2	11	14%	79%
4	8 -9	1	12	7%	86%
5	10 -11	2	14	14%	100%

Dari hasil analisis distribusi frekuensi dapat diketahui posisi data persentil 85%. Dari **tabel V.15** diketahui distribusi frekuensi dari tiap tiap kelas intervalnya. Data distribusi frekuensi digunakan untuk mengetahui posisi data persentil 85%. Dari tabel di atas diketahui distribusi frekuensi pada kelas interval dan persentil 85% berada pada interval kelas 8 – 9 dengan frekuensi 1 dan frekuensi kumulatif sebesar 12.

Analisis Kebutuhan Halte Berdasarkan Jumlah Minimal Penumpang

Dari hasil perhitungan menggunakan persentil 85 dapat diketahui jumlah minimal penumpang persegmen yang memerlukan halte yaitu sebesar 9 penumpang. jika suatu segmen jalan memiliki potensi penumpang kurang dari 9 maka tidak membutuhkan halte karena jika ada halte pun akan menjadi kurang efisien. Berikut merupakan tabel kebutuhan yang sudah disesuaikan dengan perhitungan persentil 85 yaitu sebagai berikut :

SEGMENT	JUMLAH PNP	JUMLAH MINIMUM PNP	KEBUTUHAN
TERMINAL BANDAR JAYA - SIMPANG POLSEK TB	7	9	TIDAK BUTUH
SIMPANG POLSEK TB - HALTE TK PEMBINA YK JAYA	10	9	BUTUH
HALTE TK PEMBINA YK JAYA - SIMPANG KOPEL	10	9	BUTUH
SIMPANG KOPEL - SD NEGERI 1 PONCOWATI	2	9	TIDAK BUTUH
SD NEGERI 1 PONCOWATI - TRANSAT PONCOWATI	2	9	TIDAK BUTUH
SIMPANG KOPEL - SIMPANG KECAMATAN TB	7	9	TIDAK BUTUH
SIMPANG KECAMATAN TB - PASAR CANDIREJO	2	9	TIDAK BUTUH
SIMPANG KECAMATAN TB - PASAR BANDAR AGUNG	4	9	TIDAK BUTUH
TERMINAL BANDAR JAYA - PERTOKOAN NADIA BUSANA	4	9	TIDAK BUTUH
PERTOKOAN NADIA BUSANA - SIMPANG TUGU KOPIAH EMAS	9	9	BUTUH
SIMPANG TUGU KOPIAH EMAS - SMPN 2 GUNUNG SUGIH	4	9	TIDAK BUTUH
SMPN 2 GUNUNG SUGIH - SMPN 2 ANAK TUHA	2	9	TIDAK BUTUH
SMPN 2 ANAK TUHA - SMAN 1 ANAK TUHA	2	9	TIDAK BUTUH
SIMPANG TUGU KOPIAH EMAS - HALTE SMPN 1 GUNUNG SUGIH	2	9	TIDAK BUTUH

Setelah melalui analisis kebutuhan halte berdasarkan jumlah penumpang minimal sebagaimana pada **tabel V.16** dapat disimpulkan bahwa dari 14 segmen terdapat 3 segmen yang membutuhkan fasilitas tempat pemberhentian angkutan umum.

Analisis Kebutuhan Berdasarkan Jarak dan tata guna lahan

Berdasarkan analisis kebutuhan halte dari jumlah minimal penumpang didapatkan 3 segmen yang membutuhkan halte, maka pada analisis ini hanya akan menganalisis 3 segmen tersebut. Analisis ini dikerjakan berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat No. 271/HK105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Perencanaan Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum. Sehingga dari pedoman tersebut dapat dihitung jumlah kebutuhan halte berdasarkan jarak serta tata guna lahan di wilayah studi dan dipadukan dengan jarak dan tata guna lahan sesuai standar. Berikut merupakan tata gunalahan dan jarak antar halte masing – masing segmen menurut standar teknis.

SEGMENT	TATA GUNA LAHAN	JARAK STANDAR
SIMPANG POLSEK TB - HALTE TK PEMBINA YK JAYA	PEMUKIMAN	300 - 400
HALTE TK PEMBINA YK JAYA - SIMPANG KOPEL	PEMUKIMAN, SEKOLAH	300 - 400
PERTOKOAN NADIA BUSANA - SIMPANG TUGU KOPIAH EMAS	PERKANTORAN, PEMUKIMAN	300 - 400

Dari penentuan kebutuhan halte diketahui bahwa yang membutuhkan halte ada 3 segmen. Segmen Simpang polsek TB – halte TK Pembina YK jaya dengan panjang segmen 1900 meter, segmen Halte TK Pembina YK jaya – Simpang Kopel dengan panjang segmen 1300 meter dan Segmen Pertokoan Nadia Busana – Simpang tugu kopiah emas dengan Panjang 4200 meter.

SEGMENT	PANJANG SEGMENT
SIMPANG POLSEK TB - HALTE TK PEMBINA YK JAYA	1900
HALTE TK PEMBINA YK JAYA - SIMPANG KOPEL	1300
PERTOKOAN NADIA BUSANA - SIMPANG TUGU KOPIAH EMAS	4200

Berikut contoh perhitungan kebutuhan halte berdasarkan jarak antarhalte dan tata guna lahan

Segmen : simpang polsek tb – halte tk Pembina yk jaya

Karakteristik Lokasi : Kota

Tata Guna Lahan : Pemukiman

Panjang Segmen : 1900

Jarak minimal dari simpang : 50 meter

Farside & Nearside : $50 \times 2 = 100$ meter

$$\text{Kebutuhan Halte Ideal} = \frac{\text{Panjang Segmen} - \text{Jarak Minimal Dari Simpa}}{\text{Standar Tempat Henti}}$$

$$= \frac{1900}{400}$$

$$= 4,8$$

$$= 4,8$$

$$= 5 \text{ Buah}$$

Jadi kebutuhan ideal untuk Halte disegmen simpang polsek TB – Halte TK Pembina YK jaya adalah 5 buah. Perhitungan tersebut juga berlaku untuk semua segmen yang ada. Sehingga diperoleh jumlah kebutuhan halte pada tiap segmennya sebagai berikut :

SEGMENT		PANJANG SEGMENT	TATA GUNA LAHAN	JARAK STANDAR	KEBUTUHAN HALTE	HALTE EKSISTING	HALTE USULAN
SIMPANG POLSEK TB	HALTE TK PEMBINA YK JAYA	1900	PEMUKIMAN	300 – 400	5	1	4
HALTE TK PEMBINA YK JAYA	SIMPANG KOPEL	1300	PEMUKIMAN, SEKOLAH	300 – 400	3	1	2
PERTOKOAN NADIA BUSANA	SIMPANG TUGU KOPIAH EMAS	4200	PERKANTORAN, PEMUKIMAN	300 – 400	11	TIDAK ADA	11

Berdasarkan analisis mengenai jarak dan jumlah fasilitas halte berdasarkan tata guna lahan dapat diketahui kebutuhan halte pada ketiga segmen tersebut adalah 8 halte.

Penentuan Titik Tempat Pemberhentian Halte

Dilihat dari hasil analisis kebutuhan halte persegmen dibutuhkan penambahan halte di beberapa titik lokasi berdasarkan kantong- kantong penumpang dan tata guna lahan pada lokasi studi, oleh sebab itu diperlukan penentuan titik lokasi penempatan halte yang sesuai dengan standar SK. Dirjen Perhubungan Darat No: 271/HK.105/DRJD/96. Berikut ini merupakan rencana lokasi halte menurut kantong-kantong penumpang dan tata guna lahan :

SEGMENT	KEBUTUHAN HALTE	TITIK HALTE USULAN	status jalan	tipe jalan
SIMPANG POLSEK TB - HALTE TK PEMBINA YK JAYA	2	Jl.lintas Sumatera samping pertokoan	jalan nasional	2/2 UD
		Jl.lintas sumatera depan rumah warga	jalan nasional	2/2 UD
HALTE TK PEMBINA YK JAYA - SIMPANG KOPEL	1	Jl.lintas Sumatera samping PO. Putra Remaja	jalan nasional	2/2 UD

Dimensi halte rencana

Menurut SK. Dirjen Perhubungan Darat No. 271/HK105/DRJD96 tentang pedoman teknis perkerjasama tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum, dimensi ukuran minimal halte untuk yang ditetapkan adalah 4 m x 2 m. Ruang gerak bebas penumpang pada halte adalah 0,9 m x 0,6 m per penumpang atau dengan luas 0,54 m². Untuk melakukan perhitungan dimensi, dibutuhkan jumlah penumpang tertinggi tiap segmen yang didapat dari hasil survei dinamis.

NO	TRAYEK	SEGMENT	JUMLAH PNP
1	A1, B, A2	SIMPANG POLSEK TB - HALTE TK PEMBINA YK JAYA	10
2	A1, B, A2	HALTE TK PEMBINA YK JAYA - SIMPANG KOPEL	10
3	G, C1	PERTOKOAN NADIA BUSANA - SIMPANG TUGU KOPIAH EMAS	9

Berikut contoh perhitungan dimensi halte standar teknis dari ruang gerak bebas penumpang :

Nama segmen : pasar ternak-IAIN kampus 2

Jumlah penumpang : 19

SK Ruang gerak bebas : 0,9 m x 0,6 m

Luas Halte

Ruang Gerak Bebas x Jumlah Penumpang

Luas halte

:

: 0,54 m² x 10 pnp/jam waktu sibuk

: 5,4 m²

Panjang halte

Panjang halte

:

$\frac{\text{Luas Halte}}{\text{Lebar Minimal}}$

: 5,4 / 2

Panjang halte

: 3 m

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan ukuran halte pada segmen simpang polsek TB adalah 3 x2 m. perhitungan tersebut juga berlaku untuk semua segmen yang akan dilakukan penambahan halte .Sehingga diperoleh dimensi setiap halte pada tiap segmen sebagai berikut :

SEGMENT	JUMLAH PNP	LUAS	UKURAN	UKURAN USULAN
SIMPANG POLSEK TB - HALTE TK PEMBINA YK JAYA	10	5,4	2,7 x 2	4 x 2
HALTE TK PEMBINA YK JAYA - SIMPANG KOPEL	10	5,4	2,7 x 2	4 x 2
PERTOKOAN NADIA BUSANA - SIMPANG TUGU KOPIAH EMAS	9	4,86	2,4 x 2	4 x 2

Berdasarkan tabel diatas ukuran dimensi halte paling besar adalah segmen simpang polsek TB sampai halte TK pembina YK jaya dan segmen halte tk pembina YK jaya sampai simpang kopel dengan dimensi 2,7 m x 2 m, sesuai dengan ukuran minimum halte sedangkan ukuran dimensi halte paling kecil adalah segmen pertokoan nadia busana sampai simpang tugu kopiah emas dengan dimensi 2,4 m x 2 m. standar ukuran minimal halte adalah 4 m x 2 m, jadi dimensi halte yang diperoleh dari hasil perhitungan yang tidak memenuhi standar ukuran minimal halte akan diusulkan dimensinya menjadi standar ukuran yaitu 4 m x 2 m. Untuk tinggi halte tidak ada perhitungan secara pasti maka disesuaikan dengan standar teknis yang berlaku dimana tinggi halte minimum adalah 2,5 meter diukur dari lantai hingga bagian atap paling bawah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan terkait dengan fasilitas dan prasarana tempat pemberhentian angkutan umum pada trayek angkutan perdesaan sebagai berikut :

1. Terdapat 10 titik halte eksisting berdasarkan survei inventarisasi halte pada trayek angkutan perdesaan yang masih belum sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan.

2. Berdasarkan hasil analisa kebutuhan halte di Kabupaten Lampung Tengah dengan perhitungan permintaan & tata guna lahan dibutuhkan penambahan halte sejumlah 8 halte pada kantong penumpang di sepanjang ruas jalan yang di lalui oleh trayek angkutan pedesaan.
3. Dari hasil analisis didapati terdapat 3 segmen yang tidak memenuhi standar minimum, Maka dimensi halte yang diperoleh dari hasil perhitungan yang tidak memenuhi standar ukuran minimal halte akan diusulkan dimensinya menjadi standar ukuran yaitu 4 x 2 meter.

SARAN

Saran yang diberikan terkait dengan pengembangan prasarana halte di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu:

1. Untuk masyarakat diharapkan agar fasilitas halte dapat dimanfaatkan secara maksimal agar dapat bertahan lama dan diawasi serta peliharaan.
2. Kepada pemerintah perlu adanya pengawasan dan pemeliharaan terhadap fasilitas halte dan memberikan fasilitas halte sesuai dengan kebutuhan dan standar teknis SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96 agar pengguna halte dapat menggunakan halte dengan rasa aman dan nyaman sesuai standar teknisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2009, Undang-Undang RI Nomor 22. *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
- _____, 2013, Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2013. *Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta.
- _____, 1996, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96. *Tentang Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum*, Jakarta.
- _____, 2012, Peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor 10 tahun 2012. *tentang standar pelayanan minimal angkutan massal berbasis jalan*, Jakarta.
- _____, 2014, Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 74 tahun 2014. *tentang angkutan jalan*, Jakarta.
- Nuryadi, Tutut Dewi. et al. 2017, *Dasar-dasar Statistik untuk penelitian*, Yogyakarta.
- Kelompok PKL Kabupaten Lampung Tengah, 2022, *Laporan umum taruna politeknik transportasi darat-STTD Program studi diploma III Manajemen Transportasi Jalan, pola umum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten Lampung Tengah*, Bekasi.